

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, SERTA PENGGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BUMDes
(Studi Empiris pada BUMDes di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Ulfa Luthfiana Masjidin
17.0102.0095

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bidang perekonomian menjadi hal penting yang harus dikembangkan di seluruh desa di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maupun kementerian lainnya sudah merealisasikan berbagai kebijakan dalam mendukung peningkatan perekonomian di desa, salah satunya dengan mendirikan BUMDes. Namun, kebijakan tersebut membutuhkan pengawasan dan evaluasi oleh lembaga berwenang, agar tujuan kebijakan baik *output* maupun *outcome* dapat tercapai dengan optimal. Dibutuhkan dorongan dalam meningkatkan kreatifitas dan inovasi agar mampu mengembangkan potensi desa yang unggul dan bernilai ekonomi. Jika BUMDes di desa tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akan berdampak pada kegagalan kemandirian desa sehingga tetap bergantung pada bantuan pemerintah (Alfianto, 2019).

Permendesa No 4 Tahun 2015 mengenai Badan Usaha Milik Desa (Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan rakyat. BUMDes dibuat sebagai upaya mengayomi masyarakat desa baik dalam bidang ekonomi maupun pelayanan publik yang diberikan.

Pengelolaan keuangan BUMDes pada pengurusan keuangan yang tahapannya dimulai dengan perencanaan rencana anggaran, perealisasi merealisasikan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan menyusun laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan aset BUMDes. Perencanaan merupakan rencana sumber dana masuk dan dana keluar dalam satu tahun anggaran (Suharyono, 2020). Pelaksanaan merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan merupakan pelaksana fungsi kebendaharaan. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan keuangan. Pertanggungjawaban merupakan laporan pertanggungjawaban direktur BUMDes atas pengelolaan usaha. Pengurus BUMDes sebagai pengelola operasional memiliki kewajiban untuk memajukan dan menjadikan BUMDes sebagai badan usaha yang mampu memberikan pelayanan prima khususnya memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat desa. BUMDes juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

BUMDes di Indonesia pada tahun 2017-2020 mengalami pertumbuhan yang pesat di beberapa desa. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya BUMDes yang tersebar mencapai 60.911 di tahun 2019. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini didasarkan atas pemahaman desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan kondisi perekonomiannya. Dalam menjalankan usahanya yang efektif dan efisien BUMDes harus berpegang teguh terhadap akuntabilitas (Kurniadi, 2020).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan penggunaan dana desa, terutama untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum seluruhnya memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan disebut belum merencanakan pembinaan pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Selain itu, tidak pula mengalokasikan secara khusus untuk kegiatan pembinaan pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa. Berdasarkan hasil uji petik terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan, sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu sebanyak 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, sebanyak 871 BUMDes pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan, dan 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDes (Rika, 2019).

Saat ini pertumbuhan BUMDes di Kabupaten Magelang juga mengalami peningkatan, namun dalam hal ini tentunya juga mengalami kendala dan permasalahan tersendiri seperti pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang belum maksimal. Sehingga tidak optimal dalam pengelolaan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan BUMDes belum mengoptimalkan potensi Desa untuk dikembangkan lebih luas lagi seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi (www.suaramerdeka.com).

Didirikannya BUMDes diseluruh desa merupakan strategi dalam mempercepat pembangunan perekonomian di desa. Melalui BUMDes

diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, dengan membantu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat (Suwarno, 2019). Mengelola keuangan BUMDes dilakukan melalui tahapan dari rencana anggaran, merealisasikan rencana, penatausahaan keuangan, menyusun laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Di era globalisasi, perkembangan teknologi juga selalu berjalan dan berkembang pesat. Menurut Kristiani (2012) kemajuan teknologi memberikan dampak perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh dan perkembangan industri jasa saat ini semakin meningkat pada perusahaan, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem informasi akuntansi dalam kinerja karyawan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi sistem informasi sudah menjadi kebutuhan untuk menunjukkan kerja entitas perusahaan atau organisasi tersebut.

Perencanaan merupakan rencana sumber dana masuk dan dana keluar dalam satu tahun anggaran. Penelitian Widodo & Suharyono (2021) menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rahmayanti et al. (2019) dimana fungsi perencanaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Selain itu, penelitian Asti & Cholid (2018) menunjukkan hasil bahwa perencanaan juga berpengaruh pada pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

Pelaksanaan merupakan realisasi penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan merupakan pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Penelitian Wowor et al. (2019) menyatakan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Selain itu, penelitian Mulyani et al. (2021) juga menyatakan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

Penggunaan teknologi informasi akuntansi adalah salah satu alat untuk membantu mengambil suatu keputusan saat ini. Informasi akuntansi juga dapat menjadi faktor pengendalian pengawasan BUMDes dari upaya tindakan *fraud*. Penelitian Ishak & Syam (2020) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Hasil ini didukung oleh penelitian Yanti & Musmini (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Selain itu, penelitian Selamat (2016) juga menyatakan bahwa informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Widodo & Suharyono (2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan semua variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **pertama**, menambah variabel penggunaan

teknologi informasi akuntansi sesuai dengan penelitian (Ishak & Syam, 2020). Alasan menambahkan variabel independen tersebut karena penggunaan teknologi informasi akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan BUMDes juga dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya penggunaan teknologi informasi akuntansi yang dimiliki suatu BUMDes. Sementara banyak BUMDes di Kabupaten Magelang yang kurang optimal dalam menggunakan teknologi informasi akuntansi. Masih banyak pengelola BUMDes yang mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi. **Kedua**, terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah BUMDes di Kabupaten Magelang. Karena belum maksimalnya pertanggungjawaban BUMDes yang dilakukan oleh pengelola sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perencanaan terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes?
3. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh perencanaan terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung teoritis atau menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Dan mampu menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga memberikan ilmu dalam melakukan penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan dalam penyusunan skripsi yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah memuat penjelasan fenomena, *research gap*, serta fakta-fakta yang relevan dengan fenomena untuk merumuskan alasan pentingnya dilakukan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal dimulai dari telaah teori, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis, serta model penelitian. Telaah teori terdiri dari *grand theory* yang digunakan untuk menganalisis variabel penelitian untuk merumuskan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan beberapa hal dimulai dari populasi dan sampel, data penelitian, definisi operasional variabel, metoda analisis data serta pengujian hipotesis. Definisi operasional variabel membahas mengenai definisi variabel serta pengukiran variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan pengujian yang dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji kualitas data serta pengujian hipotesis. Uji statistik deskriptif menggambarkan statistik deskriptif data, statistik deskriptif responden, serta statistik deskriptif variabel penelitian. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi. Bab ini menjelaskan beberapa hal mengenai kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan kondisi maupun situasi mengenai manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama yang mereka lakukan guna kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan mengenai adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan dalam organisasi. Sesuai dengan tujuan dari BUMDesa dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan perekonomian dimasyarakat menjadi hal yang sangat utama dan menjadi prioritas utama. Dengan demikian pengelola termotivasi dalam memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat luas dimana dengan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang dikelolanya (Davis & Donaldson, 1997).

Teori *stewardship* digambarkan sebagai situasi dimana para *steward* tidak memiliki kepentingan pribadi, akan tetapi mereka lebih cenderung mementingkan kepentingan *principal*. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah sikap untuk melayani yang dibangun oleh *steward*. Teori *stewardship* berusaha menggambarkan mengenai sebuah konsep dimana seorang pemimpin harus mementingkan kepentingan bersama dibandingkan oleh kepentingan pribadi dengan didasarkan sikap

kepercayaan dan profesionalisme (Key, 2017). Menurut Contrafatto (2014) teori *stewardship* didefinisikan bertindak sebagai:

- 1) Memanfaatkan diri sendiri dan orang-orang yang ada disekitar.
- 2) Memiliki potensi untuk memberi manfaat sekaligus mempertahankan generasi yang akan datang

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah pengelola BUMDesa diharapkan akan bekerja lebih baik dalam pengelolaan BUMDesa untuk kepentingan principal dalam hal ini masyarakat luas dan pemerintah desa setempat. Sehingga pengelola mampu melakukan tugasnya dengan tepat, dan sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian masyarakat akan lebih percaya dan yakin akan tugas yang dilakukan oleh pengelola BUMDesa. Sehingga harapan untuk kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terjamin.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam bidang pelaporan dan akuntansi bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pengurus BUMDes untuk mengakuntabilitaskan pengendalian sumber-sumber daya yang dimiliki BUMDes dan mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diambil dalam mengelola BUMDes. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes disusun dalam bentuk laporan yang lengkap baik laporan keuangan maupun laporan kinerja (Widodo & Suharyono, 2021).

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yaitu dalam dibutuhkan suatu pertanggungjawaban dengan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya, dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga terdapat mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat (Safitri et al., 2016).

Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan gambaran atas hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil kegiatan yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban dalam menggambarkan alaisis situasi pengelolaan BUMDes, yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban membuat output atau capaian kegiatan. Output yang dicapai hendaknya sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan (Widodo & Suharyono, 2021).

3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan Lembaga ekonomi ditingkat desa yang secara keseluruhan proses pengelolaannya berada di desa. Bumdes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa yang modal berasal dari desa dan masyarakat desa, dan modalnya berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar, dan sumber hukumnya diatur oleh desa melalui musyawarah desa. Menurut Agunggunanto & Arianti (2016) BUMDes merupakan suatu badan usaha di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa.

Keberhasilan upaya pembangunan desa tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya campur tangan, dukungan dan peranserta dari pemerintah desa. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipasi, dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*.

Menurut Kamaroseid (2016) BUMDes meliputi unit-unit usaha yang memiliki badan hukum. Unit usaha yang telah berbadan hukum tersebut berbentuk lembaga bisnis yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes dan masyarakat. Struktur pengurus BUMDes antara lain : penasihat, pelaksana operasional : dan pengawas.

Peraturan BUMDes yang dijadikan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal et al., (2015) dan Permendagri 113 (2014) yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes: partisipatif, kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

BUMDes dalam melakukan tugasnya memiliki tujuan utama sebagai pengayom masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian mereka di desa. BUMDes dalam hal ini dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa diantaranya pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam menjualkan barang dagangan nya kepada pasar yang berada jauh dari desa, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar desa yang dapat digunakan menjadi sesuatu yang lebih bernilai seperti memproduksi barang dagang maupun menjadikan lingkungan desa menjadi desa wisata, menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

4. Perencanaan

Perencanaan merupakan dokumen awal yang harus disusun dan disiapkan oleh pengurus BUMDes. Dokumen perencanaan setidaknya memuat analisis kelayakan investasi yang memuat perhitungan *net present value*, *payback periode*, *profitability index*, dan *internal rate of return*. Selain itu perencanaan juga menyangkut penyusunan anggaran keuangan yang meliputi *capital expenditure*, *operational expenditure*, *analisa break event point*, proyeksi laba rugi, dan sumber dana (Suharyono, 2019). Sumber dana bisa diperoleh melalui investor, kreditor ataupun dana sendiri. Perencanaan mesti diarahkan semaksimal mungkin supaya bias menggambarkan latar belakang diambilnya keputusan saat menetapkan arah kebijakan. Selain itu perencanaan harus mampu menentukan skala prioritas dan menentukan alokasi dan distribusi sumber daya.

Berdasarkan PP No 58 Tahun 2005 prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran yaitu perencanaan total pendapatan yang diperkirakan harus dapat diukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan harga batas tertinggi. Selain itu, anggaran untuk pengeluaran mesti dapat dipastikan tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Agar tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran mampu dikendalikan, maka anggaran harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, hasil, manfaat, serta sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja juga harus ditetapkan, sedangkan harga satuan harus ditetapkan secara rasional (Hermanto, 2020).

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Wowor et al., 2019). Aspek pelaksanaan dan penatausahaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan pelaksanaan dan penatausahaan yang dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat dicapai dengan baik (Suharyono, 2020).

Setelah Rancangan Anggaran Biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana akan diberikan kepada ketua BUMDes kepada setiap divisi.

Penatausahaan merupakan tahap ketiga yang dilakukan dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara BUMDes. Semua dicantumkan dalam Laporan pertanggungjawaban BUMDes (Rofidah & Rochayatun, 2020).

6. Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (B. Uno & Lamatenggo, 2011). Penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan

keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan.

Penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, pemanfaatan tingkat integrasi TI pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi terdiri dari : bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas, jaringan internet telah terpasang di unit kerja, jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antara unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputersasi, pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undang, laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur, dan peralatan yang usang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya (Jurnali, T., & Supomo, 2002).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	(Widodo & Suharyono, 2021)	Independen : Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Dependen : Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes di Kabupaten Bengkalis	Perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan terhadap pertanggungjawaban baik secara parsial maupun secara simultan. Perencanaan dan pelaksanaan serta penatausahaan yang sesuai peraturan dan standar operasional

No	Peneliti	Variabel	Hasil
			prosedur akan berdampak pada pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yang optimal
2.	(Mulyani et al., 2021)	Independen : Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran BUMDes Dependen : Kemandirian Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kemandirian desa, Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh terhadap kemandirian desa, Penguatan pengelolaan keuangan desa dan Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh terhadap kemandirian desa.
3.	(Ishak & Syam, 2020)	Independen : Kompetensi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan BUMDes	Kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
4.	(Yanti & Musmini, 2020)	Independen : Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada BUMDes Giri Artha	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh BUMDes Giri Artha adalah sebuah aplikasi pambumdesaku yang mampu meningkatkan transparansi.
5.	(Rofidah & Rochayatun, 2020)	Independen : Pengelolaan Keuangan Dependen : Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk

No	Peneliti	Variabel	Hasil
			<p>RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum.</p> <p>Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kab Malang, serta mengirim soft file kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa.</p>
6.	(Rahmayanti et al., 2019)	<p>Independen : Perencanaan</p> <p>Dependen : Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDes Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes yang ditandai dengan adanya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi strategi, dan penyusunan perencanaan anggaran.</p>
7.	(Wowor et al., 2019)	<p>Independen : Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p> <p>Dependen : Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan undang-undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari Dana Desa.</p>

No	Peneliti	Variabel	Hasil
8.	(Sumarlin & Idias, 2019)	<p>Independen : Peran BUMDesa</p> <p>Dependen : Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan BUMDesa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat</p>
9.	(Tjokro Rahardjo & Hapsari, 2019)	<p>Independen : Peran BUMDes Dalam Memanfaatkan Dana Desa</p> <p>Dependen : Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan BUMDes telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam mensejahterakan masyarakat. Kendala yang dimiliki oleh BUMDes di Desa Banyuanyar dalam melakukan perannya lebih mengacu pada kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengolah potensi desa dan masih skeptisnya masyarakat desa mengenai kehadiran BUMDes</p>
10.	(Asti & Cholid, 2018)	<p>Independen : Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa</p> <p>Dependen : Perencanaan Pengembangan BUMDes Kecamatan Kendawangan</p>	<p>Persepsi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan terhadap perencanaan pengembangan BUMDes adalah baik, yang menunjukkan pemerintah desa berpandangan positif terhadap BUMDes. Partisipasi pemerintah desa Kecamatan Kendawangan terhadap perencanaan pengembangan BUMDes secara ke-seluruhan pada</p>

No	Peneliti	Variabel	Hasil
11.	(Dwidiyantini et al., 2017)	Independen : Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur Dependen : Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan	<p>tingkat sedang. Hal ini dikarenakan keterlibatan pemerintah desa pada perencanaan pengembangan BUMDes masih belum maksimal.</p> <p>Hasil Penelitian menunjukkan (1) proses penyusunan laporan keuangan BUMDes disusun dengan format laporan keuangan jasa dan hanya membuat laporan laba rugi dan laporan modal, proses pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan dengan baik dimana dibuktikan dengan pemahaman dari anggota BUMDes akan laporan yang dilaporkan; (2) kendala BUMDes Tugu Sari Pajahan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan manufaktur adalah SDM dalam keuangan, tingkat kompetensi, lingkup organisasi yang kecil dan komponen-komponen dalam format laporan keuangan manufaktur yang kompleks; dan (3) penyesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan manufaktur menyebabkan terjadinya perubahan akun dan nominal pada laporan</p>

No	Peneliti	Variabel	Hasil
			laba rugi dan perubahan ekuitas
12.	(Selamat, 2016)	<p>Independen :</p> <p>Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Motivasi Kerja</p> <p>Dependen :</p> <p>Kinerja Karyawan Pada BUMDes Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, Simultan Sistem Informasi Akuntansi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.</p>

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Perencanaan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes (Rofidah & Rochayatun, 2020). Tahap ini terkadang tidak selalu dilakukan oleh setiap BUMDes. Perencanaan biasanya dilakukan ketika memperoleh dana dari pemerintah atau dana dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana mereka tidak melakukan perencanaan. Setelah mendapatkan dana, pengelola BUMDes akan menyusun perencanaan dengan melakukan rapat dengan pengurus per unit nya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya.

Pada teori *stewardship* perencanaan harus diarahkan semaksimal mungkin agar dapat menggambarkan latar belakang diambilnya keputusan saat menetapkan arah kebijakan. Selain itu, perencanaan juga harus mampu menentukan skala prioritas dan menentukan alokasi dan distribusi sumber daya. Agar tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran mampu dikendalikan, maka anggaran harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, hasil, manfaat, serta sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo & Suharyono (2021) menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti et al. (2019) juga menyatakan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

H1. Perencanaan berpengaruh positif terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Pelaksanaan yaitu terjadinya pengeluaran dan pemasukan kas BUMDes. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Biaya yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana akan diberikan oleh Ketua BUMDes kepada setiap divisi dengan menggunakan bukti kwitansi. Seharusnya penyerahan dana dari BUMDes ke unit pelaksana. Pihak pelaksana menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, kemudian setelah

ada pencairan dana maka seharusnya ada Bukti Pencairan SPP (Rofidah & Rochayatun, 2020).

Penatausahaan merupakan serangkaian aktivitas penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat lainnya (Gie, 1992). Penatausahaan merupakan tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dalam hal ini dilakukan oleh bendahara BUMDes. Semua dicantumkan dalam Laporan pertanggungjawaban BUMDes.

Pada teori *stewardship* dalam melakukan penatausahaan BUMDes, pencatatannya yang dilakukan akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban BUMDes dilakukan terpisah dengan program reguler. Kas umum hanya ditulis secara sederhana hanya pemasukan dan pengeluaran kas dari BUMDes kepada pelaksana. Seharusnya pencatatan yang dilakukan lebih detail. BUMDes seharusnya mencatat pengeluaran yang dilakukan, kemudian memposting ke dalam buku besar. Setelah itu membuat Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rofidah & Rochayatun (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Wowor et al. (2019) juga menyatakan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban

keuangan BUMDes. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

H2. Pelaksanaan dan Penatausahaan berpengaruh positif terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

3. Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

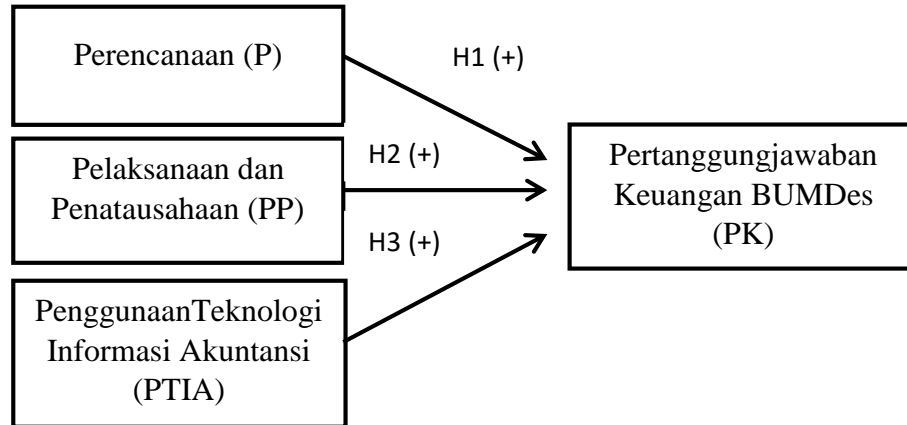
Penggunaan teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (B. Uno & Lamatenggo, 2011).

Pada teori *stewardship* dalam penggunaan teknologi informasi akuntansi diperusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam penyediaan berbagai informasi keuangan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kompleksnya proses teknologi informasi akuntansi menuntut pengalaman seorang manajer keuangan dalam teknologi informasi akuntansi dalam pelatihan, yang keduanya merupakan konstruk yang

menentukan keberhasilan penerapan teknologi informasi (Romney, M. B., & Steinbart, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ishak & Syam (2020) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Musmini (2020) juga menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dapat diduga bahwa :

H3. Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

D. Model Penelitian

Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 2018). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah BUMDes yang ada di Kabupaten Magelang.

Sampel merupakan bagian yang terdiri dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sekaran 2006 : 123). Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu, tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengurus BUMDes di Kabupaten Magelang
2. Pengurus atau pengelola BUMDes yang bekerja dibagian keuangan atau staff keuangan minimal selama satu tahun.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dan melalui google form dari responden dengan sumber asli.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sekumpulan pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Pengumpulan datanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung dan melalui google form kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Magelang.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
1.	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban merupakan kewajiban bagi pengurus BUMDes untuk mengakuntabilitaskan pengendalian sumber-sumber daya yang dimiliki BUMDes dan mempertanggungjawabkan rencana dan realisasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah diambil dalam mengelola BUMDes (Suharyono, 2019).	Menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian Widodo & Suharyono (2021) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator yaitu: 1.Laporan realisasi BUMDes 2.Bendahara BUMDes & desa membuat buku kas Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu dari 1=sangat tidak setuju sampai 5=sangat setuju
2.	Perencanaan	Perencanaan merupakan dokumen awal yang harus disusun dan disiapkan oleh pengurus BUMDes. Dokumen perencanaan setidaknya memuat	Menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian Widodo & Suharyono (2021) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan indikator : 1.Rencana kerja BUMDes 2.Tujuan BUMDes

No	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
		<p>analisis kelayakan investasi yang memuat perhitungan <i>net present value</i>, <i>payback periode</i>, <i>profitability index</i>, dan <i>internal rate of return</i>. Selain itu perencanaan juga menyangkut penyusunan anggaran keuangan yang meliputi <i>capital expenditure</i>, <i>operational expenditure</i>, analisa <i>break event point</i>, proyeksi laba rugi, dan sumber dana (Suharyono, 2019).</p>	<p>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu dari 1= sangat tidak setuju sampai 5= sangat setuju.</p>
3.	Pelaksanaan dan Penatausahaan	<p>Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Wowor et al., 2019). Penatausahaan merupakan serangkaian aktivitas penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan</p>	<p>Menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian Widodo & Suharyono (2021) yang terdiri dari 13 pernyataan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan & pengelolaan BUMDes 2. Prosedur program BUMDes 3. Pemasukan & pengeluaran kas BUMDes <p>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu dari 1= sangat tidak setuju sampai 5= sangat setuju.</p>

No	Variabel	Definisi	Skala Pengukuran
		<p>pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat lainnya (Gie, 1992).</p>	
4.	Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi	<p>Penggunaan teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (B. Uno & Lamatenggo, 2011).</p>	<p>Menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari penelitian Ishak & Syam (2020) yang terdiri dari 7 item pernyataan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar akuntansi pelaporan kas 2. Proses penggunaan teknologi informasi 3. Pengoperasian software pengelolaan keuangan BUMDes <p>Variabel diukur dengan menggunakan skala likert 1-5, yaitu dari 1= sangat tidak setuju sampai 5= sangat setuju</p>

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang jelas dan mudah dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2018;19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas biasanya digunakan mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018;51). Jika pertanyaan (indikator) dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur maka kuisisioner tersebut dikatakan valid. Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *undimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar menerapkan indikator dari variabel tersebut.

Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing dari indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan, maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali, 2018).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrix harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitive untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018). SPSS akan mengelompokkan kedalam indikator tiap variabel menjadi dua faktor berdasarkan pada nilai *eigen value* > 1 . *Loading* faktor tinggi akan mengelompok dalam satu faktor sehingga perlu dilakukan rotasi. Nilai hasil rotasi faktor (*cross loading*) harus $> 0,5$ untuk dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuisisioner mampu dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

3. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi yang digunakan untuk hipotesis sebagai berikut:

$$PK = \alpha + \beta_1P + \beta_2PP + \beta_3PTIA + e$$

Keterangan :

PK	=	Pertanggungjawaban Keuangan
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien variable
P	=	Perencanaan
PP	=	Pelaksanaan dan Penatausahaan
PTIA	=	Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi
e	=	Error

4. Uji Hipotesis

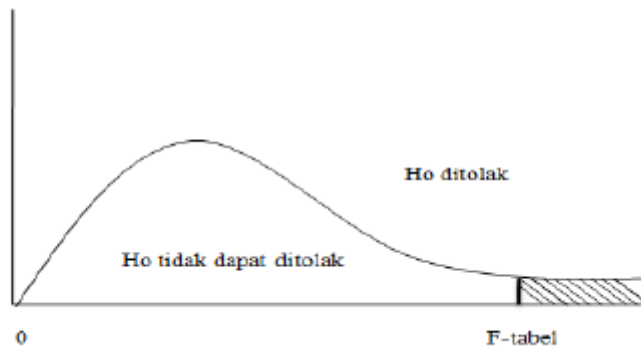
a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = $n - k - 1$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan kriteria:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya model yang digunakan bagus (*fit*)
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*).

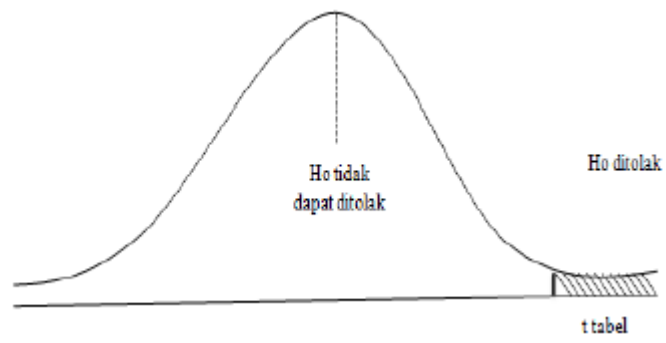


Gambar 3. 1
Uji F

c. Uji t (*t-test*)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Ketentuan yang digunakan dalam analisis ini adalah Level of significance 0,05 dengan derajat keterbatasan $df = n - 1$. Kriteria penerimaan hipotesis positif:

- a) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2
Uji T positif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan data yang diperoleh sebanyak 65 responden yang bekerja pada bagian keuangan di BUMDes Kabupaten Magelang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menjelaskan variabel pertanggungjawaban keuangan sebesar empat puluh delapan persen. Hasil uji F menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, yang berarti model penelitian ini layak. Hasil uji t menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan serta penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan perencanaan tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Perencanaan tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes dikarenakan pengurus BUMDes belum memahami tujuan dari pendirian BUMDes. Selain itu, tidak semua pengurus ikut serta dalam menyusun perencanaan BUMDes. Sehingga banyak pengurus yang tidak paham akan hal tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel perencanaan yang digunakan tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban BUMDes.
2. Penelitian ini hanya menguji perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap pertanggungjawaban keuangan BUMDes. Masih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
3. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemic covid-19, sehingga terbatas untuk bertemu dengan responden guna memberikan kuesioner penelitian secara langsung.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan variabel penelitian, sehingga mampu untuk meningkatkan penjas variabel lain yang mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan seperti sistem pengendalian eksternal.
2. Untuk memperoleh informasi lebih detail mengenai pertanggungjawaban keuangan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian.
3. Penelitian selanjutnya selain menggunakan metode kuesioner perlu juga menggunakan media seperti kuesioner online dengan menggunakan google form. Dimana ini akan menghemat waktu dalam penyebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2005, P. P. R. I. N. 58 T. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005*. 25(1), 65–90.
- 2005, P. R. I. N. 72 T. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005*. 2005(March), 25–27.
- 2014, P. M. D. N. R. I. N. 113 T. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Agunggunanto EY Arianti F, K. E. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 13 No.
- Alfianto, M. (2019). *Kinerja Keuangan Bumdes Di Kecamatan Salem (Doctoral dissertation, Universitas Peradaban)*.
- Asti, & Cholid, I. (2018). PERSEPSI DAN PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN BUMDES DI KECAMATAN KENDAWANGAN. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 6 No.
- B. Uno, H., & Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Davis, H. J., & Donaldson, L. (1997). *Toward A Stewardship Theory of Management, Academy of Management Review*. Vol 22 No, pp 20-47.
- Djiloy, N. L. (2016). PENGARUH PENGAWASAN INTERN, PERENCANAAN, DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SKPD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI. *Jurnal Katalogis*, 4, 70–82.
- Dwidiyantini, K. A., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi*, Volume 7 N.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie, T. L. (1992). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty.
- Hermanto, C. B. (2020). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 40–56.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk*

Akuntansi dan Manajemen).

- Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh Kompetensi Dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120–130. <https://jtebr.unisan.ac.id/index.php/jtebr/article/view/45>
- Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 5(2).
- Kamaroseid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Mitra Wacana Media.
- Kristiani, W. (2012). *Analisis Pengaruh Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia*. Universitas Gunadarma.
- Kurniadi, R. (2020). Pertumbuhan BUMDes sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat. *Detiknews*.
- Mamelo, G. Y., & Kalangi, L. (2019). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan KotaMobagu Timur. *Jurnal Akuntansi*.
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana, M. I. D. (2021). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran BUMDes Terhadap Kemandirian Desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi, Vol.2*.
- PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, D. T., INDONESIA, R., & 2015, N. 4 T. (2015). *Regulation of the Minister of Village, Regional Development, and Transmigration Republic of Indonesia*. 53(9), 1689–1699.
- Rahmayanti, K. P., Kusumawardhani, D., & Wardani, A. I. (2019). Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 67. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.846>
- Rika, H. (2019). BPK : BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa. *CNN Indonesia*.
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 60. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7599>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi 13.). Selemba Empat.
- Safitri, F. A., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pegelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang). *Diponegoro*

Law Review, 5(2), 1–17. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/TINJAUAN>

- Selamat, I. K. (2016). Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada BUMDes se-Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 7(2), 12–20. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21084/13178>
- Setyowati, L., & Istikha, W. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG. *Kinerja*, Vol 20 No, 179–191.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r & d*. Alfabeta.
- Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (BUMD) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648–651.
- Sumarlin, & Idias, N. W. (2019). Peran BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Modal Sosial Dan Ekonomi*, Volume 3 N.
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(01).
- Tjokro Rahardjo, Y. S. N., & Hapsari, A. N. S. (2019). Peran BUMDes Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Banyuwangi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 26(02), 79. <https://doi.org/10.35606/jabm.v26i02.453>
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Widodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes. *Relasi : Jurnal Ekonomi*, 17(1), 122–137. <https://doi.org/10.31967/relasi.v17i1.414>
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 N.
- Yanti, P. M. L. K., & Musmini, L. S. (2020). Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 47–58.